PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)**

UNIT KERJA : **INSPEKTORAT**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAIFUDDIN**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **104939**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.116.000.000

1. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000
2. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 146.000.000
3. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 147.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/78 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 182.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000
6. Tanah Seluas 3760 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
7. Tanah Seluas 4588 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
8. Tanah Seluas 10930 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000
9. Tanah Seluas 2898 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 215.682.750

1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 101.250.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 101.250.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.182.750

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**24.660.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**248.659.173**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**238.000.000**
	Sub Total	**Rp.**	**1.843.001.923**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**----**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.843.001.923**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.